

## **BPK RI DAN BPKP HARUS AUDIT ANGGARAN ASAP**

Tanggap Darurat bencana asap di provinsi riau akan berakhir dalam waktu 1 hari lagi. Pada awalnya tanggap darurat bencana asap di riau sudah berakhir pada tanggal 27 maret 2014 yang lalu. Namun, dengan kondisi asap yang semakin tebal dengan kebijakan presiden melalui intruksinya tanggap darurat di perpanjang sampai tanggal 4 April 2014. Itu artinya hanya menunggu jam maka selesailah cerita kabut asap di riau. Tetapi secara keseluruhan kabut asap yang melanda riau sejak 3 bulan yang lalu akan segera berakhir. dengan demikian apakah semua urusan terkait dengan penanganan asap berakhir. Tentunya jawabannya belum berakhir. Karena masih banyak persoalan yang harus di evaluasi terkait dengan managemant pengelolaan anggaran yang telah di gelontorkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pasalnya mereka harus mempertanggung jawabkan senmua operasional yang mereka keluarkan selama ini. Pihak terkait, seperti BPKP provinsi riau dan juga BPK RI perwakilan riau mestinya juga tidak tuli dan harus ambil peran serta harus mengaudit semua jumlah transaksi keuangan yang di gunakan untuk itu termasuk menelusuri kemana saja uang tersebut mengalir dan di gunakan untuk apa saja. Karena kalau uang rakyat yang sudah di gelontorkan itu tidak segera di audit, bagaimana akuntabilitasnya kepada publik, khususnya kepada masyarakat Riau secara keseluruhan.

Hal itu dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, namun tidak pernah optimal dan terus terjadi setiap tahun, bahkan setahun dua kali bencana asap, Melihat dari beberapa tahun terakhir, terkait penanggulangan asap, penanganannya seperti tidak pernah serius dan anggaran yang dialokasikan hanya untuk melengkapi penderitaan masyarakat Riau. Artinya realokasi anggaran untuk penanganan asap masih menjadi sebuah pertanyaan besar, kemudian kemana saja uang tersebut di habiskan, sementara ada jutaan manusia di provinsi riau masih menunggu ketegasan pemerintah dalam realokasi anggaran dan kerja nyata.

Bencana kabut asap dampak dari kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau menjadi terindikasi jadi proyek rutin setiap tahun sejak terjadinya kabut asap pada

tahun 1997. Bayangkan saja, masyarakat harus berhadapan dengan kabut asap setiap tahun sejak bencana itu terjadi pada tahun 1997 itu artinya sudah 17 tahun masyarakat riau menghirup udara bercampur racun di negerinya sendiri.

Berikut perkiraan anggaran yang di gelontorkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk penanganan asap provinsi riau:

No	Anggaran Tanggap Darurat Asap Provinsi Riau	Sumber
1.	Rp. 500.000.000.000,-	Pemerintah Pusat (2014)
2.	Rp. 10.000.000.000,-	Hibah APBD Provinsi Riau 2014

*Sumber: Di olah dari berbagai sumber*

Sumber anggaran di atas merupakan anggaran yang telah di kucurkan selama kurun waktu kurang dari satu tahun sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan asumsi ada langkah-langkah alternatif yang bisa diantisipasi dari kebakaran hutan dan lahan, tapi terbukti tahun ini masyarakat kembali mengalami kerugian material maupun imaterial akibat kabut asap.

Kami mengindikasikan, bahwa bantuan pusat maupun Anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dimanfaatkan untuk kepentingan proyek. Hal itu karena dana sebesar itu hanya untuk mengatasi persoalan yang telah terjadi dan bukan dalam upaya pencegahan,

Kami juga melihat penanggulangan asap sejauh ini dipandang hanya sebagai bentuk pengerjaan proyek, di mana asap harusnya bisa ditangani sebelum puncaknya, justru hanya ada bentuk upaya setelah kejadian dan menyengsarakan puluhan ribu jutaan jiwa masyarakat yang ada di provinsi Riau.

Parahnya lagi, setiap kali terjadi kebakaran asap Pemerintah Provinsi Riau selalu menyatakan dana tidak ada dan daerah harus menunggu bantuan pusat. Ini yang menjadi indikasi bahwa bencana kabut asap itu adalah sebuah proyek.



Disamping dampak buruk dari sisi kesehatan, ketidakseriusan pemerintah Provinsi Riau dalam menangani kabut asap tentunya berdampak pada perekonomian daerah Riau. Disamping mengalami kerugian mencapai lebih kurang 10 triliun, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama Riau dipastikan akan melambat hal ini dikarenakan kabut asap melumpuhkan transportasi dan penerbangan, perdagangan, ritel, perkebunan, investasi, UMKM dan kegiatan eksplorasi migas Riau.

Dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan tidak hanya terjadi pada triwulan pertama ini, musim kemarau pada bulan Juni-September mendatang yang diprediksi BMKG tentu akan menambah panjang kerugian ekonomi daerah Riau jika kabut asap muncul dan tidak tertanggulangi lagi. Wallahualam.

Salam

Usman  
Koor. Fitra Riau